

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN**



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2023**

Jl. Gajah Mada No. 116 Praya 83511

Email: dishub.lomboktengahkab@gmail.com

Website: perhubungan.lomboktengahkab.go.id

@r



KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Tahun 2023 ini menyajikan informasi rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini disusun dengan tujuan agar program dan kegiatan yang akan dilakukan memiliki hasil yang lebih baik dan terukur, sehingga akan menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan keselamatan berlalu-lintas di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Penyusunan Rankhir Renja ini juga dimaksudkan sebagai bahan informasi kinerja SKPD sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Praya, 14 Juli 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah,



H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Perdana Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691122 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kab. Loteng	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.....	25
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	45
BAB V PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun Anggaran 2022.....	8
Tabel 2.2	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang Direncanakan.....	18
Tabel 2.3	Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan	21
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.....	23
Tabel 2.5	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	28
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.....	34
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan.....	37
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Dishub Prov. NTB.....	39
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.....	41
Tabel 4.1	Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menjadi salah satu dasar penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dengan memperhatikan keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis, dan partisipatif politis, perencanaan *bottom-up* serta perencanaan *top-down*.

Menyelaraskan dengan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dikerjakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan cara mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja SKPD adalah untuk menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan strategis jangka pendek SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD. Disebutkan juga bahwa Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun

berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai pedoman rencana kerja yang memuat tentang arah kebijakan, program dan kegiatan, dan hal yang ingin dicapai pada tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah

7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah;
8. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Adapun *output* dan *outcome* untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi urusan perhubungan, dengan mempedomani:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu satu tahun ke depan yaitu Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menetapkan program dan kegiatan pembangunan yang strategis dalam waktu satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran RKPD Kabupaten Lombok Tengah dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang telah ditetapkan. Selain itu agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat terarah dan terukur sesuai dengan kemampuan Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan yang telah digariskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra (Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan, serta Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra), Analisis Kinerja Pelayanan, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Bab ini berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
(TAHUN ANGGARAN 2021)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Dalam Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026, tahun 2021 merupakan tahun kondisi awal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pembangunan Bidang Perhubungan.

Adapun Sasaran Strategis serta Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n-2) dan tahun 2022 (tahun berjalan/n-1) adalah sebagai berikut:

1. Sasaran: a) Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas; b) Meningkatnya Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas; serta c) Meningkatnya Layanan LLAJ dicapai melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kegiatan-kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C
 - c. Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - f. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - g. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Sasaran Meningkatnya Keselamatan Angkutan Laut dicapai melalui Program Pengelolaan Pelayaran dengan Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Berikut akan disajikan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang ditampilkan pada Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan pada tahun 2021 sebagaimana Tabel 2.1 (T-C.29) berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Lombok Tengah

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021/n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun Berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun Berjalan (Tahun 2022/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan: Perhubungan									
	Bidang Urusan: Perhubungan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	BB	CC	B	B	100	B	B	100
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase IKU OPD yang Tercapai	100	100	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	5	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30	30	30	30	100	30	30	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Keuangan OPD yang ditindaklanjuti	100	100	43	43	100	43	43	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	43	43	43	100	43	43	100
	Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	75	60	15	15	100	15	15	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	30	25	5	5	100	5	5	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM dengan Capaian Kinerja Lebih dari 80%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	-	-	-	-	1	1	100
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	75	60	15	15	100	15	15	100
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	2	2	2	100	3	3	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	20	5	5	100	5	5	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	48	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165	27	28	28	100	41	41	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Validasi Data Aset OPD	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	52	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	2	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	2	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	48	12	12	100	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	48	12	12	100	12	12	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51	48	48	48	100	51	51	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6	2	-	-	-	-	-	-
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarpras Keselamatan Jalan	79,90	41,87	43,91	45,90	104,53	48,00	48,00	100
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang	12,59	6,10	6,18	6,45	104,37	6,88	6,88	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	18886	9150	9268	9671	104,35	10326	10326	100
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7015	2007	2007	2007	100	3012	3012	100
	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	Persentase Sarana dan Prasarana Terminal yang Tersedia	50,98	35,29	35,29	35,29	100	37,25	37,25	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	26	18	18	18	100	19	19	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap	100	40,00	50,91	50,91	100	61,82	61,82	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	60	48	12	12	100	12	12	100
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	100	91,73	95	95	100	96	96	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10	6	-	-	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	45156	-	5500	5500	100	6000	6000	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	36	6	6	6	100	6	6	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan	100	80	100	100	100	20	20	100
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	60	48	12	12	100	12	12	100
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam Berlalu Lintas	80	68	70	69,71	99,59	72	72	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	60	48	12	12	100	12	12	100
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Angkutan Umum yang Dinormalisasi	100	-	-	-	-	14	14	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60	48	12	12	100	12	12	100
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	100	-	-	-	-	20	20	100
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	500	-	-	-	-	100	100	100
	Sub Kegiatan Kordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	60	48	12	12	100	12	121	100

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dikemukakan beberapa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut:

a. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target yang Direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat beberapa pekerjaan pada Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah direncanakan karena anggaran untuk kegiatan tersebut mengalami refocusing/relokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;

Pada kegiatan ini ada beberapa hal yang tidak dapat dilaksanakan karena penghapusan anggaran, yaitu;

- Kegiatan Sosialisasi Perlengkapan Jalan dan Tata Cara Berlalu Lintas di sekolah-sekolah pada 12 kecamatan;
- Pengadaan Baju Zeta (Ikon Perhubungan) sebanyak 2 buah; dan
- Penyusunan Perda Pengendalian PJU

2. Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;

Pada kegiatan ini semula dianggarkan pengadaan gembok parkir sebanyak 25 set, namun tidak dapat terlaksana.

3. Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor;

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor berupa Alat Uji Side Slip Tester dan Alat Uji Tint Tester juga mengalami refocusing anggaran, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

4. Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Pada kegiatan ini semula direncanakan adanya Sosialisasi Perijinan Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran sebanyak 2 kali, namun seperti yang sudah diuraikan di atas kegiatan ini juga tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya penghapusan anggaran.

Tidak terpenuhinya *output* pada beberapa kegiatan di atas tentu saja berimplikasi pada kurang optimalnya kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut di atas tentu saja harus menjadi catatan penting pada proses perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya.

b. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target yang Direncanakan

Program/kegiatan yang telah memenuhi target yang direncanakan diuraikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen DPA	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen DPPA	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen LKjIP	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen LKPJ	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen LPPD	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Buku Profil Perhubungan	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen Renja	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen Renstra	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen RKA	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Dokumen SPIP	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Laporan Monev	4 dok	4 dok	100	Memenuhi target
		Laporan DAK	5 dok	5 dok	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan administrasi keuangan	12 bl	12 bl	100	Memenuhi target
		Laporan Keuangan	15 dok	15 dok	100	Memenuhi target
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Aset	4 dok	4 dok	100	Memenuhi target
		Laporan Kepegawaian	15 dok	15 dok	100	Memenuhi target
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	AC Split	2 unit	2 unit	100	Memenuhi target
		ATK	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Infocus	1 unit	1 unit	100	Memenuhi target
		Kursi Rapat	19 buah	19 buah	100	Memenuhi target
		Kursi Tamu	1 set	1 set	100	Memenuhi target
		Laptop	3 unit	3 unit	100	Memenuhi target
		Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 bh	1 bh	100	Memenuhi target
		Meja Rapat	1 bh	1 bh	100	Memenuhi target
		Peralatan Kebersihan	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Peralatan Listrik dan Elektronik	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Printer	3 unit	3 unit	100	Memenuhi target
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pembangunan toilet ruangan Sekdis	1 unit	1 unit	100	Memenuhi target
		Rehab Ruangan FLLAJ	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Rehab Ruangan Kepala Dinas	2 paket	2 paket	100	Memenuhi target
		Rehab Ruangan Rapat	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Dokumen hasil konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	29 dok	29 dok	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya listrik, telp, air	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya jasa tukang kebersihan kantor	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Terbayarnya honor tim pengelola keuangan	6 bln	6 bln	100	Memenuhi target
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihara dan berlakunya STNK kendaraan dinas	48 unit	48 unit	100	Memenuhi target
II Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						
8	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Bahan material PJU	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Layanan listrik PJU	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
		Meterisasi PJU di Kec. Batukliang Utara	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Pagar pengaman jalan	48 m	48 m	100	Memenuhi target
		Perlengkapan teknisi PJU	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Rambu-rambu lalu lintas	100 bh	100 bh	100	Memenuhi target
		Suku cadang traffic light	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
9	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kuitansi retribusi PKB	80 buku	80 buku	100	Memenuhi target
		Kalibrasi alat uji	6 unit	6 unit	100	Memenuhi target
		Penembokan halaman kantor PKB	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Perangkat Smart Card	1 paket	1 paket	100	Memenuhi target
		Seragam Penguji Kendaraan Bermotor	4 stel	4 stel	100	Memenuhi target

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
10	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengendalian dan pengawasan saat insidental	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
11	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Patroli LLAJ	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
12	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Operasional Trayek Rintisan	12 bln	12 bln	-	Anggaran mengalami refocusing
		Pengawasan Ijin Angkutan dan Jalur Lintas Angkutan Barang	12 bln	12 bln	100	Memenuhi target
III Program Pengelolaan Pelayaran						
13	Kegiatan Penerbitan ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pendataan angkutan laut	1 dok	1 dok	100	Memenuhi target
		Patroli keselamatan pelayaran	10 bln	10 bln	100	Memenuhi target
		Pemeliharaan speedboat	2 unit	2 unit	100	Memenuhi target
IV Program Penataan Desa						
14	Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Sarana transportasi darat	4 unit	4 unit	100	Memenuhi target

Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2021

c. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat Program/Kegiatan yang melebihi target yang direncanakan karena adanya hibah dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM dengan rincian sebagaimana Tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target yang Direncanakan

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					

No	Program/Kegiatan	Output	Target	Realisasi	%	Ket.
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	PJU Tenaga Surya	-	200 bh	-	Kemen. ESDM
				300 bh	-	Kemenhub
		Water Barrier	-	60 bh	-	Kemenhub
		Traffic Cone	-	144 bh	-	Kemenhub

Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan Dishub Kab. Loteng TA. 2021

Dengan terpenuhinya hampir seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan (realisasi fisik pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar 99,78%), maka diharapkan hal ini dapat berimplikasi pada peningkatan layanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah kepada masyarakat dalam memenuhi sasaran kegiatannya seperti yang tertuang pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah, yaitu meningkatnya keselamatan lalu lintas. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang mengalami refocusing anggaran akan dilakukan pengusulan kembali di tahun mendatang baik melalui usulan APBD maupun APBN.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Pada tahun 2021, pembangunan bidang perhubungan khususnya terkait masalah transportasi diprioritaskan pada tujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Secara umum hasil evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 diuraikan pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Dearah	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian Tahun-		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah daerah rawan kecelakaan			n/a	100	98	96	n/a	100	98	96	
2	VC rasio			0,35	0,34	0,33	0,32	0,35	0,34	0,33	0,32	
3	Persentase sarpras keselamatan jalan			43,91	48,00	55,96	64,20	43,91	48,00	55,96	64,20	
4	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang			6,18	6,88	8,34	9,76	6,18	6,88	8,34	9,76	
5	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia			35,29	37,25	39,22	43,14	35,29	37,25	39,22	43,14	
6	Persentase lokasi parkir yang tergarap			50,91	61,82	72,73	83,64	50,91	61,82	72,73	83,64	
7	Persentase kendaraan yang laik jalan			95,00	96,00	97,00	98,00	72,10	96,00	97,00	98,00	

No	Indikator Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian Tahun-		Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
8	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan			20,00	20,00	40,00	40,00	20,00	20,00	40,00	60,00	
9	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas			70,00	72,00	74,00	76,00	70,00	72,00	72,00	76,00	
10	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi			-	14	36	57	-	14,00	36	57	
11	Persentase penerbitan PAS Kecil angkutan laut			-	20,00	40,00	60,00	-	20,00	40,00	60,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya sumber daya manusia di Bidang Perhubungan
2. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat-pusat kegiatan di kecamatan. Permasalahan ini berkaitan dengan tidak beroperasinya sebagian besar trayek yang telah ditetapkan oleh SK Bupati Lombok Tengah dan masih kurangnya pelayanan Terminal Tipe C (Terminal Mujur).
3. Rendahnya *load factor* (faktor muat) penumpang yang menggunakan angkutan umum
4. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan yang masih minim dibandingkan dengan jumlah ruas jalan kabupaten
5. Belum optimalnya pelayanan parkir
6. Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan yang masih cukup tinggi
7. Tidak tertampungnya beberapa kegiatan yang merupakan skala prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah pada APBD.

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan pelayanannya yaitu:

- a. Tantangan yang dihadapi antara lain:
 - Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah yang semakin meningkat
 - Dijadikannya Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Super Prioritas dan adanya event-event internasional pada Pertamina Mandalika International Street Circuit
 - Meningkatnya rute dan volume penerbangan yang dilayani oleh Bandara Internasional Lombok
 - Besarnya intensitas penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Lombok Tengah

- Pusat aktivitas yang belum merata
- b. Peluang yang ada antara lain:
- Adanya regulasi yang memadai
 - Adanya keterbukaan informasi publik, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat
 - Adanya sinergi terkait strategi dan upaya penanganan masalah transportasi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat

Dari permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi tersebut maka dapat disusun isu-isu strategis yang penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan program kegiatan prioritas, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi, yang meliputi:
 - a. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama pada daerah rawan kecelakaan
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas
 - c. Kurangnya fasilitas keselamatan jalan
 - d. Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan serta perlunya peningkatan penertiban parkir liar
 - e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
 - f. Kurangnya kompetensi teknis serta sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam mendukung kelancaran pelayanan di bidang perhubungan.
2. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan, yang meliputi:
 - a. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi serta menurunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum

- b. Fasilitas pendukung transportasi (seperti terminal dan shelter) memerlukan penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi
- c. Semakin berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) di saat menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan Langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat, sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Berikut reviu terhadap Rancangan Awal RKPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 2.5
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab. Lombok Tengah	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	55,96	16.286.375	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kab. Lombok Tengah	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	60,00	33.809.257,3	
1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	8,34	14.427.855	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	8,67	29.942.660	Penambahan usulan pada meterisasi PJU di 11 kecamatan dan pengadaan neon box pada tiang PJU pada ruas jalan BIL-Songgong
	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	12.510		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	12.999		
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpelihara	4013		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Lombok Tengah	Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang terpasang	5320		
2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	Terminal Mujur	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia	39,22	184.800	Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C	Terminal Mujur	Persentase sarana dan prasarana terminal yang tersedia	39,22	365.000	Penambahan usulan pada penataan Shelter Sengkol
	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Mujur	Jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum yang tersedia	20		Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terminal Mujur	Jumlah fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum yang tersedia	20		
3	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lombok Tengah	Persentase lokasi parkir yang tergarap	72,73	301.510	Kegiatan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Lombok Tengah	Persentase lokasi parkir yang tergarap	72,73	211.948	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah lokasi parkir yang tergarap	40	301.510	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah lokasi parkir yang tergarap	40		
Jumlah penertiban parkir yang dilaksanakan			528	Jumlah penertiban parkir yang dilaksanakan				528			
Jumlah gembok parkir yang tersedia			25	Jumlah gembok parkir yang tersedia				-			
4	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Persentase kendaraan yang laik jalan	97	821.810	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Persentase kendaraan yang laik jalan	97	1.035.450	Pengadaan alat uji diusulkan menjadi 2 unit
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang tersedia	7		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	UPTD PKB	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang tersedia	8		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor	20.622		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		UPTD PKB	Jumlah Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang terkalibrasi	7		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			UPTD PKB		Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang terkalibrasi
5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	40	150.000	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	40	520.894.800	Adanya event-event internasional

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	2	150.000	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	2	520.894.800	
			Jumlah dokumen kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang disusun	1				Jumlah dokumen kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang disusun	-		
			Operasional Forum LLAJ	24				Operasional Forum LLAJ	24		
			Jumlah sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	2				Jumlah sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	-		
6	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Lombok Tengah	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	74	125.400	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kab. Lombok Tengah	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas	74	235.160	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penertiban lalu lintas yang dilaksanakan	720	125.400	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penertiban lalu lintas yang dilaksanakan	720	235.160	
			Jumlah sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan	7				Jumlah sosialisasi keselamatan berlalu lintas yang dilaksanakan	7		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
7	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi	36	275.000	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasi	36	1.498.144,5	Tambahan pengusulan sarana transportasi darat melalui dana DAK
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum yang dilaksanakan	288	275.000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum yang dilaksanakan	288	1.498.144,5	
			Jumlah sosialisasi angkutan umum yang dilaksanakan	7				Jumlah sosialisasi angkutan umum yang dilaksanakan	7		
			Jumlah survey statis-dinamis yang dilaksanakan	1				Jumlah survey statis-dinamis yang dilaksanakan	1		
			Jumlah dokumen kajian trayek perdesaan dan trayek perkotaan yang tersusun	1				Jumlah dokumen kajian trayek perdesaan dan trayek perkotaan yang tersusun	1		
			Operasional trayek rintisan perkotaan	1				Operasional trayek rintisan perkotaan	1		
								Pengadaan sarana transportasi darat (DAK)	2		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
II	Program Pengelolaan Pelayaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	40	270.780	Program Pengelolaan Pelayaran	Kab. Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	40	3.396.441,1	Ada penambahan usulan
8	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	40	270.780	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Lombok Tengah	Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	40		pengadaan rambu suar dan penyusunan Perbup Retribusi Jasa Kepelabuhan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penerbitan PAS Kecil angkutan laut	200		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Ijin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Tengah	Jumlah penerbitan PAS Kecil angkutan laut	200		
Jumlah bimtek kru kapal yang dilaksanakan			1		Jumlah bimtek kru kapal yang dilaksanakan (pelatihan operator speedboat)			1			
Jumlah dokumen kajian perairan yang tersusun			1		Jumlah dokumen kajian perairan yang tersusun			1			
					Pembangunan rambu suar			2			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
								Penyusunan Perbup Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan	1		
								Pembangunan pos pengawasan angkutan laut	2		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana keselamatan jalan, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten (Forum SKPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan.

Pada Musrenbang Tahun 2022, semua usulan dan aspirasi masyarakat dari 12 Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah adalah terkait pengadaan fasilitas keselamatan jalan. Namun karena terbatasnya pagu anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan maka tidak semua usulan tersebut dapat dipenuhi. Dan Dinas Perhubungan tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut melalui pengajuan usulan ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Penyelenggaraan LLAJ; - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kec. Janapria	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang	1 paket	Pengadaan PJU Tenaga Surya

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 maka Visi dan Misi Kementerian Perhubungan adalah **“Terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”** dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri, dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Adapun Tujuan dari Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Sedangkan Sasaran Strategis dari Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi;
4. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;
5. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum;
6. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;
7. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari uraian misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 di atas terdapat point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada point meningkatnya konektivitas, meningkatnya kinerja layanan perhubungan, serta meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan

NO	Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya konektivitas	Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
2	Meningkatnya kinerja layanan perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan - Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis 	Terbatasnya anggaran	Kebutuhan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan 	Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi
		Kemacetan (pada lokasi dan jam tertentu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif 	

3.1.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 yaitu **"Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 6 (enam) Misi pembangunan.

Dinas Perhubungan Provinsi NTB turut serta dalam mendukung Misi Pertama yaitu **NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.**

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTB yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas layanan transportasi
2. Meningkatnya keselamatan transportasi darat

Sedangkan Strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Provinsi NTB yaitu "Terwujudnya Konektivitas antar Wilayah dan Keselamatan Lalu Lintas Transportasi Publik" adalah:

1. Menyelenggarakan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung pariwisata dan event internasional MotoGP;
2. Menyediakan jasa pelayanan sektor transportasi yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan yang mengutamakan integrasi antarmoda dan intermodal untuk angkutan umum, jalan kaki, dan sepeda;
4. Menyiapkan regulasi daerah di sektor transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi, pengembangan wilayah strategis, dan mengantisipasi isu strategis terkait Covid-19, gender dan disabilitas, kebencanaan, perubahan iklim, dan SDGs.
5. Meningkatkan keselamatan lalu lintas melalui upaya meningkatkan manajemen keselamatan jalan, meningkatkan jalan berkeselamatan, meningkatkan sarana transportasi yang berkeselamatan, sosialisasi keselamatan bagi pengguna jalan, dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait penangan kecelakaan.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Konektivitas Layanan Transportasi	Rendahnya load factor (faktor muat) penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan angkutan umum masih dibawah standar - Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi - Berkembangnya angkutan tidak dalam trayek (online) 	Kebutuhan masyarakat akan transportasi
2	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi topografi jalan - Banyaknya resiko berbahaya pada daerah rawan kecelakaan - Kurangnya fasilitas keselamatan jalan - Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan 	Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan transportasi
		Kemacetan (pada lokasi dan jam tertentu)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas jalan - Kurangnya jalan alternatif 	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

3.2.1 Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan merupakan implemementasi/penjabaran Visi-Misi Bupati Lombok Tengah serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan serta Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampe 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Lombok Tengah, dimana Visi-nya adalah "mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju, dan berbudaya" dengan misi-misi sebagai berikut:

1. Merawat akhlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai SDM yang cerdas, mandiri, dan unggul;
3. Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih;
4. Pembangunan ekonomi yang berkeimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas (*merupakan misi yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah*);
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Berdasarkan Visi-Misi Bupati Lombok Tengah, telaahan terhadap Visi-Misi Kementerian Perhubungan dan Visi-Misi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan mencermati kondisi terkini dan isu-isu strategis yang kemudian dirumuskan dan dianalisa, maka dirumuskanlah Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk periode 2021-2026 yaitu "**meningkatkan keselamatan lalu lintas**" dengan indikator jumlah daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Lombok Tengah.

3.2.2 Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

Sasaran strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*), dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah **“meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas”** yang diukur dengan VC Rasio (tingkat kejenuhan jalan).

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2023 diuraikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas		Jumlah daerah rawan kecelakaan		98
2		Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas	VC Rasio (tingkat kejenuhan jalan)		0,33

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah seperti yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan 2 Program dengan 8 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan prioritas Urusan Perhubungan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - 2) Kegiatan Pengeloaan Termnal Penumpang Tipe C, dengan Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - 3) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota

- 4) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 5) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 6) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 7) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatan:
- 8) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Selain itu ditetapkan 1 Program dengan 8 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan Penunjang dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Renstra, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis serta arah kebijakan nasional, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	15						17,190,084,738						19,932,795,076		
2	15	01											8 Predikat	4,619,724,947	
2	15	01	2.01										100 %	42,501,393	
2	15	01	2.01	01									5 Dokumen	9,871,785	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	06									26 Laporan	32,629,608	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02										100 %	4,080,612,191	
2	15	01	2.02	01									43 Orang/bulan	4,058,433,320	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	07									15 Laporan	22,178,871	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.03										100 %	25,651,362	
2	15	01	2.03	04									7 Laporan	25,651,362	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05										100 %	16,960,515	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15 Dokumen	15,418,650	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Dishub Kab. Loteng	15 Dokumen	16,960,515	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP	%	%	%	100 %	117,092,438						100 %	128,801,682	
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	62,308,438	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dishub Kab. Loteng	10 Paket	68,539,282	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	18,000,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dishub Kab. Loteng	12 Paket	19,800,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52 Laporan	36,784,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Jalan dan Irigasi Kondisi Baik 1. Jalan dan Irigasi Kondisi Baik	Dishub Kab. Loteng	52 Laporan	40,462,400	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	%	%	%	100 %	136,004,007						100 %	125,819,108	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 dokumen	69,485,007	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan Kab. Loteng	12 dokumen	76,433,508	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 dokumen	66,519,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan Kab. Loteng	12 dokumen	49,385,600	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Kondisi Baik	%	%	%	100 %	181,253,360						100 %	199,378,696	
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	181,253,360	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aset/BMD pada OPD	45 Unit	199,378,696	Dinas Perhubungan
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarpras keselamatan jalan	%	%	%	55.96 %	12,939,687,749						55.96 %	15,152,915,115	
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang	%	%	%	9.76 %	10,250,245,902						9.76 %	11,257,207,124	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Paket	10,202,181,022	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perengkapan jalan	1 Paket	11,112,399,124	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	48,064,880	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perengkapan jalan	5 Unit	144,808,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Lokasi Parkir yang Tergarap	%		%	72.73 %	109,827,996						72.73 %	120,810,796	
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 dokumen	109,827,996	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Fasilitas parkir	12 dokumen	120,810,796	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Laik Jalan Persentase kendaraan yang laik jalan	% %		% %	97 % 97 %	679,604,803						97 % 97 %	1,322,500,000	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	421,604,803	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batujai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan wajib uji	2 Unit	1,000,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				6000 Dokumen	150,000,000	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batujai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan wajib uji	6000 Dokumen	172,500,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 paket	108,000,000	Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Batujai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan wajib uji	2 paket	150,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen lalu lintas yang dilaksanakan	%		%	40 %	446,903,558						40 %	621,247,020	
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				20 dokumen	446,903,558	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengguna jalan	20 dokumen	621,247,020	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase kepatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas Persentase Kepatuhan Pengguna Jalan dalam berlalu lintas	% %		% %	74 % 74 %	107,807,880					74 % 74 %	240,534,000		
2 15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				12 dokumen	107,807,880	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengguna jalan	12 dokumen	240,534,000	Dinas Perhubungan	
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Trayek Angkutan Umum dinormalisasi Persentase trayek angkutan umum yang dinormalisasikan	% %		% %	36 % 36 %	1,345,297,610					36 % 36 %	1,590,616,175		
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	1,345,297,610	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Angkutan orang dan/atau barang	2 Unit	1,590,616,175	Dinas Perhubungan	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penerbitan PAS kecil Angkutan Laut Persentase Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	% %		% %	40 % 40 %	74,204,038					40 % 40 %	160,155,014		
2 15 03 2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan laut Jumlah Penerbitan PAS Kecil Angkutan Laut	% %		% %	40 % 40 %	74,204,038					40 % 40 %	160,155,014		
2 15 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	74,204,038	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol Kab. Lombok Tengah, Pujut, Kuta Kab. Lombok Tengah, Pujut, Mertak Kab. Lombok Tengah, Praya Barat, Selong Bianak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemilik angkutan laut di bawah 7GT	12 Laporan	160,155,014	Dinas Perhubungan	
TOTAL							17,190,084,738						19,932,795,076		

BAB V

PENUTUP

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023. Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan terutama pada daerah-daerah rawan kecelakaan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas
2. Perlunya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung oleh sarana dan prasarana jalan maupun terminal yang memadai, terutama pada saat gelaran event nasional maupun internasional di KEK Mandalika
3. Perlunya perhatian pada ketersediaan sarana dan prasarana di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terutama untuk persyaratan peningkatan akreditasi dan layanan kepada masyarakat
4. Perlunya Langkah-langkah inovatif dalam menyelesaikan permasalahan transportasi/angkutan umum di Kabupaten Lombok Tengah
5. Pengembangan transportasi laut selain diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir khususnya nelayan dan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan daerah.
6. Untuk mencapai keberhasilan dari program Rencana Kegiatan ini, maka capaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Praya, 14 Juli 2022
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Tengah,


H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691122 199203 1 004